

ANALISIS PERAN KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA (BI) RATE TERHADAP NILAI TUKAR US\$ DAN INFLASI

Saridawati

Program Studi Akuntansi
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
saridawati.sti@bsi.ac.id

ABSTRACT

Many things certainly affecting the depreciation of the rupiah against the US dollar. Certainly one of them is the amount of demand and supply on the US dollar itself. On one hand, the fulfillment of the various needs of society in the country form the background so that the import policy was taken. On the other hand, payments using the US dollar against the needs of the imported product, of course, will raise the demand for the US dollar. Meanwhile, the rupiah against the US dollar is one of the important factors that affect the domestic price changes. Price changes in this country, if not controlled properly will lead to inflation. This can be seen from the trend of depreciation of the rupiah against the US dollar followed by a rise in the inflation rate in the country. BI Rate is one of the policy instruments that are owned by the government to reduce the amount of money in circulation, so as to control the rate of growth of inflation.

Keywords : BI Rate, Rupiah, US Dollar, Inflation

I. PENDAHULUAN

Besaran nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat merupakan salah satu komponen indikator perekonomian yang penting dalam perekonomian dalam negeri. Mengingat besaran dominasi produk impor yang masuk kedalam negeri dan hutang luar negeri kepada berbagai lembaga bantuan moneter yang harus dibayarkan menggunakan dollar Amerika Serikat.

Data perkembangan impor Indonesia berdasarkan sektor yang penulis dapatkan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2015) menunjukkan bahwa untuk sektor MIGAS saja, sepanjang tahun 2012 impor Indonesia mencapai angka 42.564.185.201 US\$, dengan rincian impor minyak mentah sebesar 10.803.249.662 US\$, hasil minyak 28.679.368.375 US\$ dan gas sebesar 3.081.567.164 US\$. Sementara impor sektor non MIGAS yang mencapai total 149.125.286.326 US\$.

Sepanjang tahun 2013 untuk sektor migas mengalami peningkatan impor menjadi 45.266.350.700 US\$ dengan rincian impor minyak mentah yang naik hingga 13.585.809.560 US\$, impor hasil minyak sebesar 28.567.587.907 US\$, dan impor gas 3.112.953.233 US\$.

Sementara impor sektor non MIGAS mencapai 141.362.319.180 US\$.

Penurunan impor terjadi pada tahun 2014 dimana sektor migas mencapai angka

43.459.900.495 US\$ dengan rincian minyak mentah mencapai 13.072.429.222 US\$, impor hasil minyak sebesar 27.362.504.534 US\$, dan impor gas sebesar 3.024.966.739 US\$. Sementara impor sektor non MIGAS mencapai angka 134.718.916.110 US\$.

Data impor diatas menunjukkan betapa kondisi perekonomian dalam negeri yang bergantung cukup besar terhadap berbagai produk impor yang pembayarannya dilakukan menggunakan dollar Amerika Serikat.

Pembayaran berbagai macam produk impor ini dengan menggunakan dollar Amerika Serikat tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius apabila nilai tukar rupiah tidak mampu mengimbangi besaran permintaan terhadap dollar Amerika Serikat yang terealisasi melalui besaran pembayaran atas kebutuhan produk impor.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat seperti yang terjadi sejak Januari 2015 hingga Juni 2015, secara tidak langsung akan memicu terjadinya kenaikan harga barang-barang impor, mengingat pembayaran yang dilakukan atas barang impor tersebut menggunakan dollar Amerika Serikat.

Kenaikan harga barang-barang impor ini, apabila tidak mampu dikendalikan secara terus-menerus, tentunya akan memicu terjadinya inflasi didalam negeri. Dikarenakan dominasi produk impor mencakup berbagai barang kebutuhan pokok serta berbagai barang komplementer.

Banyak hal tentunya yang mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Tentu salah satunya ialah besaran permintaan dan penawaran terhadap dollar Amerika Serikat itu sendiri. Disatu sisi, pemenuhan berbagai macam kebutuhan masyarakat dalam negeri mejadi latar belakang sehingga kebijakan impor barangpun diambil. Namun disisi lain, pembayaran yang menggunakan dollar Amerika Serikat terhadap produk impor tersebut, tentunya akan menaikkan permintaan terhadap dollar Amerika Serikat. Disinilah pemerintah membutuhkan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang akan diambil. Apabila besaran impor tidak bisa di kontrol dengan baik maka akan meningkatkan permintaan terhadap dollar Amerika Serikat dan menyebabkan harga barang-barang impor tersebut naik dan dapat menyebabkan inflasi apabila dibiarkan dalam kurun waktu tertentu.

Kebijakan moneter yang tepat sebagai fungsi controlling terhadap hubungan saling mempengaruhi antara tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan Inflasi menjadi fundamental. Salah satu kebijakan tersebut ialah kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Moneter

Marthon dalam Putra, (2015:42) menyatakan bahwa *financial system* (sistem keuangan) merupakan suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keunagan) bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pada abad pertengahan (masa kehadiran islam), sistem keuangan belu ditemukan di negara-negara eropa, namun diakhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan hingga racangan dari sistem keuangan terbentuk.

A. Tolak Ukur Stabilitas Moneter

Tolak ukur stabilitas moneter, sebagaimana yang disampaikan Pohan dalam Putra, (2015:42) diantaranya laju inflasi, suku bunga, nilai tukar Mata Uang dan ekspektasi masyarakat

Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya daya beli

akan dan tidak bergairahnya sektor riil sehingga perlu dilakukan stabilisasi dengan menaikkan tingkat suku bunga.

Bank Indonesia juga perlu menstabilkan perubahan nilai tukar rupiah, agar tetap menjaga kestabilan harga-harga di dalam negeri dan faktor penarik bagi luar negeri. Memang ada kalanya nilai tukar rupiah yang melemah, dapat menarik dari sisi daya beli luar negeri dan memberikan dampak positif dalam pembangunan.

B. Sistem Perbankan dan Moneter Indonesia

Nurastuti dalam Putra, (2015:42) menjelaskan bahwa bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral termasuk dalam sistem moneter. Di Indonesia, yang digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas yaitu Bank Indonesia, dan bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian dari suatu sistem moneter

Nurastuti dalam Putra, (2015:42) menyatakan bahwa fungsi pokok otoritas moneter antara lain :

1. Mengeluarkan uang kertas dan logam
2. Menciptakan uang primer
3. Memelihara cadangan devisa nasional
4. Mengawasi sistem moneter

Nurastuti dalam Putra, (2015:42) lebih lanjut menyampaikan fungsi sistem moneter, meliputi :

1. Menyeleggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil.
2. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui kebijakan moneter.

C. Peranan Kebijakan Moneter di Negara Berkembang

Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini sebagaimana yang disampaikan Sukirno dalam Putra, (2015:43).

Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan

pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertumbuhan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan.

Kedua, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negara tersebut, karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenikan yang besar sekali, dan ada kalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada ketahanan ekonomi dan kelancaran pembangunan.

Peningkatan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati-hati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, menyebabkan kestabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal). Efektifitas kebijakan moneter yang dapat terlihat adalah bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan, kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian.

Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep, mengenai Bank Pedesaan (rural bank) sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI Unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan, seperti yang disampaikan Rahardjo dalam Putra, (2015:43).

Di negara berkembang, diperlukan suatu kerjasama dengan setiap Bank Umum agar mampu menjadi Bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun, prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM, diperlukan perhatian yang selektif agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terhadap lembaga asing, juga diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter (Putra, 2015:43).

D. Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu yakni : (Putra, 2015:43)

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudential dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara makro ekonomi. Namun banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikro ekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagai control yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikro prudential yang sudah dibentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu : (Putra, 2015:44)

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank

Berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Masyarakat juga lebih dimudahkan dalam memberikan pertanyaan dan bisa diselesaikan segala permasalahan keuangan hingga ke bagian yang terkecil. Saat ini, efektifitas kedua lembaga ini, sangat mampu untuk membantu hingga pada lapisan terkecil baik kabupaten dan kota. Namun untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah secara signifikan, masih diperlukan sosialisasi secara lebih intensif. Dengan dilakukan sosialisasi secara intensif, maka akan membuat masyarakat dapat optimal mengendalikan sistem keuangan.

E. Esensi Kebijakan Moneter dalam Pembangunan

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan melakukan serangkaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Kunangwangsih dalam Putra, (2015:44) mengatakan bahwa kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral meliputi :

1. Kebijakan Kuantitatif

a. *Open Market Operation* (menjual atau membeli surat berharga)

Kunangwangsih dalam Putra (2015:45) menyatakan bahwa Bank Sentral melakukan jual beli surat-surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika terjadi kelebihan uang beredar, Bank Sentral mengambil

kebijakan moneter dengan menjual SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga sebagian uang masyarakat yang beredar dapat ditarik. Sebaliknya, bila perekonomian kekurangan Jumlah Uang Beredar (JUB), maka untuk mendorong perekonomian pemerintah akan membeli SBI. Dalam penerapannya dapat disebutkan :

Menjual SBI ----- JUB berkurang

Membeli SBI ----- JUB bertambah

b. *Reserve Requirement* (Mempengaruhi cadangan minimum)

Bank Indonesia menetapkan dana cadangan tetap bank umum pada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan bank umum. Seandainya Bank Sentral menganggap bahwa jumlah uang beredar sudah terlalu banyak, bank umum telah berlebihan dalam menyalurkan kreditnya maka bank sentral dapat menaikkan cadangan wajibnya, demikian pula sebaliknya. Kunangwangsih dalam Putra, (2015,:44) mengatakan bahwa adanya kenaikan cadangan wajib, akan mengurangi ekspansi kredit.

Cadangan minimum naik ----- JUB berkurang

Cadangan minimum turun ----- JUB bertambah

c. *The Discount Rate* (Mempengaruhi tingkat bunga diskonto)

Bank Indonesia dapat merubah, menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi peredaran uang. Kunangwangsih dalam Putra, (2015,:44) mengatakan bahwa bila permintaan uang meningkat, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga pinjaman yang berakibat mengurangi permintaan kredit dan memperbesar juga uang beredar dan sebaliknya.

Tingkat diskonto naik ----- JUB berkurang

Tingkat diskonto turun ----- JUB bertambah

2. Kebijakan Kualitatif

a. *Selective Credit Control* (Pengawasan terhadap kredit)

Kunangwangsih dalam Putra, (2015,:44) mengatakan bahwa pengawasan dalam pemberian kredit pada sektor produktif adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan.

b. Moral Suasion

Bank Sentral dapat melakukan himbauan menggunakan tulisan atau lisan berupa ajakan untuk untuk melakukan atau tidak suatu tindakan tertentu. Misalnya, Bank Indonesia mengajak bank-bank nasional maupun Bank Asing mengusahakan penurunan tingkat bunga.

Perlambatan kondisi perekonomian Indonesia yang juga selaras dengan perlambatan dari perekonomian Tiongkok mengakibatkan Bank Indonesia memerlukan beberapa hal dari kebijakan kuantitatif yaitu Membeli SBI, cadangan minimum turun dan Tingkat diskonto turun sehingga bisa menambah jumlah uang beredar. Hal ini dapat meningkatkan semangat bagi sektor riil dalam meningkatkan usahanya sekaligus untuk menstabilkan perekonomian. Namun untuk kebijakan moneter kualitatif harus memperhatikan corak pinjaman yang dikucurkan secara selektif sehingga tidak terjadi kredit macet dan diperlukan suatu moral suasion secara khusus bagi bank umum lainnya dalam hal pemberian kredit selektif sekaligus mampu menurunkan suku bunga secara menyeluruh seperti yang disampaikan (Kunangwangsih dalam Putra. 2015:44).

2.2. Kebijakan BI Rate

Tingkat bunga menurut Sunariyah dalam Novitasari, (2015:5) dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Unit waktu biasanya dinyatakan dalam satuan tahun (satu tahun investasi) atau bisa lebih pendek dari satu tahun.

Uang pokok berarti jumlah uang yang diterima dari kreditur kepada debitur. Menurut ekonom klasikal, permintaan dan penawaran investasi pada pasar modal menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga akan menentukan keseimbangan antara jumlah tabungan dan permintaan investasi. Tingkat bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis).

Tingkat bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Mishkin (2008:60), menyatakan bahwa stabilitas suku bunga mendorong terjadinya stabilitas pasar keuangan sehingga kemampuan pasar keuangan untuk menyalurkan dana dari orang yang memiliki peluang investasi produktif dapat berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga tetap stabil.

2.3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Salvatore dalam Angkouw (2013:983) mengatakan bahwa perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs sebagaimana yang disampaikan. Mankiw dalam Angkouw, (2013:984) mengatakan bahwa nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil (*real exchange rate*) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain Sebagaimana yang disampaikan.

Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan

guna melakukan pembayaran ke luar negeri (impor), diturunkan dari transaksi debit dalam neraca pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan kuat, apabila transaksi autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit (surplus neraca pembayaran), sebaliknya dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit, atau bisa dikatakan jika permintaan valuta asing melebihi penawaran dari valuta asing (Nopirin dalam Angkouw, 2013:984).

Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak terkendali akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya ke pasar ekspor oleh karena itu pengelolaan nilai mata uang yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro (Pohan dalam Angkouw, 2013:984).

A. Teori Paritas Daya Beli

Krugman dan Maurice dalam Angkouw, (2013:984) mengatakan bahwa teori paritas daya beli bermaksud menjelaskan penentuan kurs asing keseimbangan berdasarkan harga dalam negeri dan luar negeri. Paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)* menyatakan bahwa harga mata uang mencerminkan daya beli umumnya. Tingkat kurs antar mata uang seharusnya mencerminkan daya beli internasional relatif mata uang tersebut yang dinyatakan dalam tingkat harga umum relatifnya. Terdapat dua versi dari teori tersebut :

1. Versi Mutlak

Krugman dan Maurice dalam Angkouw, (2013:984) menyatakan bahwa versi mutlak adalah suatu kurs keseimbangan suatu negara rasio tingkat harga umum domestik terhadap tingkat harga umum luar negeri, hal ini dinyatakan :

$$r = \frac{PD}{PF}$$

Dimana, r = kurs yang dinyatakan sebagai harga mata uang domestik dari unit mata uang asing, PD = ukuran harga domestik, PF = ukuran harga luar negeri.

2. Versi Relatif

Krugman dan Maurice dalam Angkouw, (2013:984) menyatakan versi relatif adalah perubahan kurs keseimbangan suatu negara mencerminkan perubahan rasio tingkat harga umum domestik terhadap tingkat harga umum luar negeri.

$$r_1 = \frac{\left[\frac{PD}{PF} \right]_1}{\left[\frac{PD}{PF} \right]_0} \times r_0$$

Subkrip 1 dan 0 berturut-turut merupakan periode sekarang dan periode dasar. Dari kedua versi ini yang cukup valid menjadi prediktor yang efisien adalah versi relatif, namun efisien atau tidaknya bergantung dari apakah gangguan berasal, dari sektor riil atau sektor moneter dari perekonomian sehingga menyebabkan deviasi antara kurs yang diprediksi dan kurs aktual.

B. Elastisitas Permintaan

Sukirno dalam Angkouw (2013:984) mengatakan bahwa Elastisitas permintaan (*elasticity of demand*) adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang.

C. Elastisitas Penawaran

Sukirno dalam Angkouw (2013:984) mengatakan bahwa Elastisitas penawaran (*elasticity of supply*) juga merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang.

2.4. Inflasi

A. Demand Pull Inflation

Demand pull inflation terjadi karena kuat dan pesatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat sehingga melebihi kapasitas penawaran agregat yang diproduksi. Jumlah produksi tidak dapat ditingkatkan dalam waktu yang relatif singkat karena terbatasnya investasi modal dan teknologi dalam jangka pendek, sehingga kapasitas produksi tidak mampu mengimbangi besarnya peningkatan permintaan masyarakat. (Nanga dalam Pratiwi, 2013:5). Akibatnya, terjadi persaingan antarpelaku ekonomi untuk merebutkan keterbatasan *output* tersebut sehingga mendorong kenaikan harga secara umum dan terciptalah inflasi.

Samuelson dan Nordhaus dalam Pratiwi, (2013:5) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting terjadinya inflasi ini karena disebabkan oleh pertumbuhan volume jumlah uang beredar yang cepat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat dan diikuti oleh kenaikan permintaan agregat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan *output* yang diproduksi, maka harga-harga umum akan naik.

Sukirno (2004:333) menyatakan bahwa *Demand Pull Inflation* terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat.

Kebijakan moneter memiliki peran penting melalui pengaruhnya terhadap konsumsi, produksi dan investasi. Faktor lain yang mempengaruhi inflasi jenis ini adalah perubahan yang bersifat *shock* dari kebijakan fiskal, permintaan luar negeri, perubahan perilaku konsumen dan produsen, serta efisiensi dan produktivitas perekonomian.

Thanh dalam Pratiwi, (2013:5) menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan permintaan agregat dalam perekonomian melebihi penawaran agregatnya, maka harga akan cenderung naik dan dapat memicu inflasi. Permintaan agregat terdiri dari seluruh pengeluaran dalam perekonomian seperti : $AD = C + I + G (X - M)$

C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, serta X dan M merefleksikan pengeluaran untuk ekspor dan impor.

Meningkatnya permintaan agregat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik mencerminkan semakin meningkatnya pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan mendorong peningkatan pengeluaran yang dilakukan masyarakat sehingga meningkatkan permintaan agregat. Permintaan yang tumbuh pesat melebihi *output* potensialnya akan menjadi permintaan yang inflasioner.

B. *Cost Push Inflation*

Cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya *input* produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensinya, sehingga perusahaan menyesuaikan *supply* barang atau merubah harga jual produksinya (Nanga dalam Pratiwi, 2013:5).

Inflasi penawaran juga mencakup *supply shocks inflation* yang dapat memicu kenaikan harga pada penawaran barang. (Samuelson dan Nordhaus dalam Pratiwi, 2013:6).

Faktor kejutan (*shock*) yang termasuk dalam inflasi ini adalah pada saat terjadi kenaikan harga komoditas internasional termasuk harga minyak mentah dunia, kenaikan harga domestik melalui kontrol pemerintah, kenaikan harga bahan makanan karena *shock* produksi yang disebabkan gangguan iklim dan cuaca, atau kenaikan harga barang impor karena adanya depresiasi nilai tukar. Kajian teoritis yang menjelaskan tentang fenomena inflasi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran para ekonom yang membuat landasan teori berdasarkan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.

C. Keterkaitan Tingkat Suku Bunga dengan Inflasi

Suku bunga juga merupakan harga (*opportunity cost*) yang harus dibayarkan atas uang yang dipegang dalam kurun waktu tertentu. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu dalam membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk aset finansial. Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : suku bunga nominal yaitu rate yang dapat diamati oleh pasar dan suku bunga riil yaitu konsep yang mengukur tingkat bunga sesungguhnya, setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

Hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi dijelaskan oleh Fisher sebagaimana yang disampaikan Mankiw dalam Pratiwi, (2013:6) melalui persamaan : $i = r + \pi$

i adalah suku bunga nominal, r adalah suku bunga riil, dan π adalah tingkat inflasi. Dalam persamaan tersebut, suku bunga nominal memiliki hubungan positif dan searah dengan inflasi. Ketika tingkat inflasi tinggi, otoritas moneter menaikkan suku bunga nominal jangka pendeknya dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sehingga dapat menurunkan inflasi. Apabila kebijakan disinflasi yang dilaksanakan oleh otoritas moneter dapat berjalan secara konsisten, maka dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan likuiditas pada sektor riil akan direduksi dengan menurunnya harga-harga barang konsumsi. Namun dalam praktiknya, suku bunga nominal jangka pendek diatur untuk mengarahkan pergerakan suku bunga perbankan. Apabila kenaikan suku bunga nominal direspon oleh suku bunga tabungan dan kredit pada bank umum (suku bunga kredit meningkat di atas tingkat suku bunga BI rate), peningkatan suku bunga tersebut dapat menurunkan investasi di sektor riil sehingga berdampak pada penurunan output.

Penurunan output merupakan dampak dari kenaikan biaya produksi karena tingginya suku bunga yang berlaku, sehingga dapat memicu kenaikan harga dan semakin menekan inflasi. Keterkaitan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi Berdasarkan teori kuantitas, fluktuasi yang terjadi pada harga disebabkan oleh naik turunnya volume uang yang beredar (JUB) dalam perekonomian.

Irving Fisher dalam Mankiw dalam Pratiwi, (2013:7) menyatakan bahwa, “pada hakikatnya perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga”, yang berarti peningkatan persentase jumlah uang beredar akan sama dengan peningkatan persentase tingkat inflasi, Mankiw dala Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah

uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat harga yang dapat diprediksikan oleh perekonomian, dan dalam jangka panjang hal tersebut dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi karena tingginya laju inflasi.

D. Keterkaitan Nilai Tukar dengan Inflasi

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga relatif dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar mempengaruhi net ekspor dan menjelaskan bagaimana perubahan harga luar negeri berdampak pada harga domestik (Gali dalam Pratiwi, 2013:8).

Hubungan nilai tukar terhadap perubahan tingkat harga dapat dijelaskan oleh persamaan berikut : (Mankiw dalam Pratiwi, 2013:8)

$$\text{Kurs Nominal} = \text{Kurs Riil} \times \text{Rasio Tingkat Harga} \\ e = E \times (P^*/P)$$

P adalah tingkat harga domestik dan P* adalah tingkat harga luar negeri. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar nominal (e) memiliki hubungan positif dengan tingkat harga domestik (P).

Depresiasi atau kenaikan nominal nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain akan meningkatkan harga barang impor karena melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara. Jika kontribusi impor memiliki peranan penting terhadap perekonomian, khususnya terhadap proses produksi, maka depresiasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga domestik dan memicu kenaikan inflasi.

Madura (2006:299) menjelaskan, perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktifitas perdagangan internasional. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara tersebut akan menurun, disebabkan tingkat ekspor yang menurun pula, disebabkan harga yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan dalam negeri tersebut cenderung meningkatkan impor. (Pratiwi, 2013:7).

Kedua hal tersebut akan menekan tingkat inflasi yang tinggi pada mata uang suatu negara. Tingkat inflasi antar negara yang berbeda, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar akan berubah sesuai dengan inflasi tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder. sumber sekunder yang penulis gunakan merupakan sumber yang tidak langsung diterima penulis, melainkan melalui orang lain atau dokumen yang telah tersedia dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu seperti artikel jurnal dan buku, serta beberapa beberapa dokumen laporan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Surat Kabar baik elektronik maupun cetak.

3.2. Analisis Data

Penulis mengambil data dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik deskriptif. Penulis menganalisis data yang telah terkumpul yang kemudian dijelaskan menggunakan penjelasan deskriptif analisis tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat general atau umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan nilai Jakarta Inter Bank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang penulis dapatkan melalui situs resmi Bank Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia pada periode 2 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015 dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai angka Rp. 13.367 per dollar Amerika Serikat pada posisi tertinggi, yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2015. Yang diawali pada nilai Rp. 12.474 per dollar Amerika Serikat per 2 Januari 2015 dan Rp. 13.332 per dollar Amerika Serikat per 30 Juni 2015.

Periode yang sama tahun 2014, pelemahan terburuk nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp. 12.267 per dollar Amerika Serikat, sementara pada tanggal 2 Januari 2014 nilai tukar rupiah mencapai angka Rp. 12.242 per dollar Amerika Serikat, dan Rp. 11.969 per dollar Amerika Serikat pada 30 Juni 2014.

Pratiwi (2013:19) menjelaskan bahwa Depresiasi atau kenaikan nominal nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain akan meningkatkan harga barang impor karena melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara. Jika kontribusi impor memiliki peranan penting terhadap perekonomian, khususnya terhadap proses produksi, maka depresiasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga domestik dan memicu kenaikan inflasi.

Berdasarkan teori tersebut, menurut penulis setiap kenaikan signifikan yang terjadi bagi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tentunya harus membutuhkan pencegahan yang

cukup serius dari pemerintah agar fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga barang baik melalui ekspor maupun impor, tidak mengarah kepada inflasi yang dapat berakibat krisis bagi perekonomian dalam negeri.

Kekhawatiran akan kenaikan harga yang diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah sehingga dapat memicu terjadinya inflasi berkepanjangan seperti yang penulis jelaskan diatas, dapat kita lihat dari tingkat inflasi Indonesia yang mengikuti tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang penulis olah dari situs resmi Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2015 terjadi peningkatan inflasi di angka tertinggi hingga mencapai 7,26 % pada bulan Juni 2015. Tren peningkatan ini terjadi sejak bulan Januari 2015 yang menyentuh angka hingga 6,96 % dan sempat menurun hingga angka 6,29 % pada bulan Februari 2015. Namun, keadaan inflasi kebalik meningkat 6,38 % pada maret 2015, 6,79 % pada april 2015, 7,15 % pada mei dan 7,26 pada juni 2015.

Kebijakan dari pemerintah guna mencegah inflasi yang berkepanjangan tentunya dibutuhkan dalam hal ini. Agar tren kenaikan inflasi yang mengikuti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dapat terkontrol dengan baik.

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter, memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu, yakni : (bi.go.id dalam Putra, 2015:43)

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada

stabilitas sistem keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR).

Berdasarkan kelima peran utama tersebut Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang dapat mempengaruhi laju inflasi diantaranya ialah kebijakan pengendalian suku bunga Bank Indonesia (BI Rate).

Sunariyah dalam Novitasari, (2015:5) menyatakan bahwa BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia dapat merubah, menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi peredaran uang. Bila permintaan uang meningkat, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga pinjaman yang berakibat mengurangi permintaan kredit dan memperbesar juga uang beredar dan sebaliknya (Putra, 2015:45).

Berdasarkan asumsi tersebut, setiap kenaikan harga yang disebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang dapat memicu terjadinya inflasi oleh pemerintah melalui kebijakan BI *Rate* berusaha mengontrol peredaran uang yang beredar. Dengan asumsi semakin sedikit uang beredar, maka terjadi penurunan atas permintaan dan berakibat pada penurunan atas harga yang berujung pada pengendalian terhadap inflasi.

V. PENUTUP

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dalam negeri.

Perubahan harga dalam negeri ini apabila tidak dikendalikan secara baik akan memicu terjadinya inflasi. Hal ini terlihat dari tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi dalam negeri.

BI Rate merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat mengontrol laju pertumbuhan inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkouw, Junaedy. (2013). Perubahan Nilai Tukar Rupiah Pengaruhnya terhadap Ekspor Minyak Kelapa Kasar (CCO) di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3
- Dwijayanthi, Febrina & Naomi, Prima. (2009). Analisis Pengaruh BI Rate, dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007. *Karisma*, Vol 3 (2): 87-98, 2009.
- Madura, Jeff. (2006). *Keuangan Perusahaan Internasional*. Edisi kedelapan. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mishkin, Frederic S. (2008). *Ekonomi, Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi kedelapan, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, Istriyansyah. (2013). Pengaruh Inflasi, Harga Minyak Mentah Indonesia, dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): Data Per Bulan Periode 2006-2012). Universitas Bawijaya.
- Pratiwi, Ardianing. (2013). Determinan Inflasi Indonesia: Jangka Panjang dan Pendek. Universitas Brawijaya.
- Putra, M. Umar Maya. (2015). Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikrosil*. Vol 5, No.1.
- Sukirno (2004), *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.